



PEMKOT-PENGADILAN JALIN KERJA SAMA

Proses Tipiring Bakal Lebih Singkat

YOGYA (KR) - Persidangan tindak pidana ringan (tipiring) di wilayah Kota Yogya bakal berjalan lebih singkat. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran tidak perlu lagi menunggu jadwal persidangan hingga berhari-hari, melainkan dapat langsung diproses saat itu juga.

Hal ini seiring kesepakatan kerja sama peningkatan pelayanan publik antara Pemkot Yogya dengan Pengadilan Negeri (PN) Yogya. "Misal Sat Pol PP menertibkan pelanggar perda, maka sidang tipiring bisa digelar hari itu juga. Begitu ditangkap, langsung sidang, dan langsung bayar denda. Sehari bisa selesai," tandas Ketua PN Yogya Soesilo, usai menandatangani kesepakatan kerja sama di Balaikota, Kamis (6/9).

Menurutnya, pola kerja sama pelayanan publik semacam ini pernah ia terapkan di beberapa kota/kabupaten lain tempatnya bertugas sebelumnya seperti di Atambua atau Ambon. "Hasilnya pun cukup baik. Masyarakat merasa senang karena waktu mereka tidak terbuang untuk menjalani proses persidangan," imbuhnya.

Sidang pelayanan terpadu tersebut tidak terbatas tipiring yang diampu oleh Sat Pol PP Kota Yogya. Soesilo menambahkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya juga bisa memanfaatkan untuk kepentingan administrasi kependudukan. Di antaranya persidangan untuk perbaikan akta kelahiran maupun sidang perceraian. Misalnya saat masyarakat ingin memperbaiki kekeliruan nama, tanggal atau ganti nama di akta kelahiran, datanya akan langsung dihubungkan dengan data di Dindukcapil ketika sudah ada putusan.

Sementara Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat tersebut dilakukan dengan perbaikan pelayanan di bidang hukum. Ia berharap semua layanan menjadi lebih cepat, terpadu dan prosesnya lebih jelas.

Namun demikian, meskipun pelayanan di bidang hukum menjadi lebih sederhana dan cepat, Haryadi tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak melihat hal tersebut sebagai kesempatan untuk melanggar hukum dengan lebih mudah.

"Harapannya, persoalan hukum atau pelanggaran peraturan daerah bisa lebih ditekan. Masyarakat lebih patuh terhadap hukum," tandasnya. (Dhi)-c

Instansi	Nilai Berita	Sifat
----------	--------------	-------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Perekonomian Pengemb. P			
3. Dinas Kependudukan dan Catatan			
4. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005